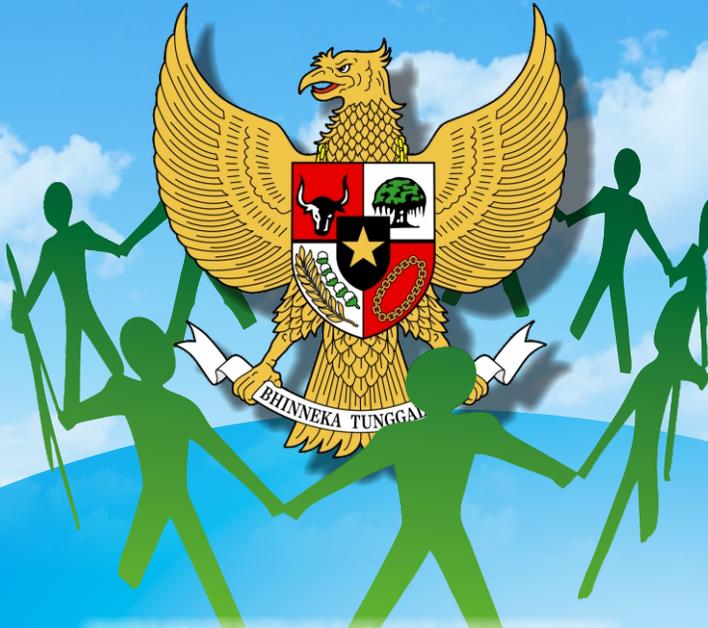


Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, M.Pd



PENGEMBANGAN MATERI

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM



**PENGEMBANGAN MATERI PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM**

Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, M.Pd



Hak Cipta pada penulis
Hak Penerbitan pada penerbit
dilarang memperbanyak/memproduksi sebagian
atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis
dari pengarang dan/atau penerbit.

Kutipan pasal 72:

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta
(UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/(atau) denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, M.Pd



PENGEMBANGAN MATERI
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN

DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM



**PENGEMBANGAN MATERI PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM**

Penulis

Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, M.Pd.

Desain Cover

Team Laduny Creative

Lay Out

Team Laduny Creative

ISBN. 978-602-5825-94-1

16 x 24 cm; x + 88 hal

Cetakan Pertama, April 2019

Dicetak dan diterbitkan oleh:

CV. LADUNY ALIFATAMA (Penerbit Laduny)

Anggota IKAPI

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 49 Iringmulyo, Metro – Lampung.

Telp. 0725 (7855820) - 0811361113

Email: ladunyprinting@gmail.com

DAFTAR ISI

COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2. Manfaat Praktis	8
1.5. Spesifikasi Produk yang Akan Dikembangkan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1. Deskripsi Teori	9
2.1.1. Pengembangan Bahan Ajar/ Materi.....	9
2.1.2. Pendidikan Kewarganegaraan	15
2.2. Penelitian Relevan.....	20
2.3. Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Rancangan Penelitian Pengembangan	27
3.2. Subject Penelitian.....	30
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	32
3.4. Instrumen Pengumpulan Data	33
3.5. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1. Hasil Analisis Kebutuhan Dosen dan Mahasiswa Terhadap Bahan Ajar/ Materi Pendidikan Kewarganegaraan Di PTKI.....	39
4.1.1. Hasil Analisis Kebutuhan Dosen	39
4.1.2. Hasil Analisis Kebutuhan Mahasiswa	42
4.2. Prototype Bahan Ajar/ Materi Pendidikan Kewarganegaraan Di PTKI.....	44
4.2.1. Aspek Materi.....	44

4.2.2. Aspek Bahasa dan Tata Tulis	49
4.2.3. Aspek Design Grafis	50
4.3. Pembahasan.....	52
4.3.1. Hasil Penilaian Dan Saran Perbaikan Prototype Bahan Ajar/ Materi Pendidikan Kewarganegaraan Di PTKI	52
4.3.2. Bahan Ajar/ Materi Pendidikan Kewarganegaraan Di PTKI Pasca Perbaikan.....	61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	83
5.1. Simpulan	83
5.2. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan faktor utama dalam membangun sumber daya manusia yang bermutu. Dalam hal ini berarti setiap jenjang dan jalur pendidikan memiliki peran yang besar dalam mewujudkannya melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan. Untuk menjadi bermakna, pembelajaran harus menekankan *transfer of value* dan tidak hanya melulu melaksanakan *transfer of knowledge* karena seyogyanya tujuan akhir dari pembelajaran adalah perubahan tingkah laku peserta didik menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional¹, yang menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Undang-Undang tersebut secara jelas menerangkan bahwa pengetahuan yang merupakan aspek kognitif hanya merupakan salah satu bagian dalam pendidikan, sedangkan bagian yang lain yang memiliki porsi lebih besar adalah afektif dan psikomotor. Walaupun demikian, ketiganya merupakan bentuk integral

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN)

ketercapaian pembelajaran agar menciptakan keselarasan pemikiran, sikap dan perilaku peserta didiknya.

Pendidikan tinggi sebagai salah satu jenjang pendidikan yang berpijak pada Tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) harus mampu mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa².

Dewasa ini sumber daya manusia Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berdasarkan data *global human capital report 2017*, kualitas SDM di Indonesia berada di urutan ke-65 atau naik tujuh peringkat dibandingkan tahun lalu. Lebih menggembirakan lagi, karena pada indikator *human development* kondisi pendidikan di Indonesia mendapatkan skor 67,2 dan menempati peringkat ke-53 dunia³. Namun disisi lain sumber daya manusia Indonesia mengalami degradasi moral dan karakter, hal ini nampak dari berbagai kasus korupsi yang menjerat pejabat negara, gelombang radikalisme dan terorisme yang terus teregenerasi hingga sekarang, separatisme dan masih banyak permasalahan sosial lain yang seharusnya tidak terjadi jika karakter ke-Indonesia-an tertanam kuat di dalam diri masyarakatnya.

Menyikapi hal ini, hakekatnya pemerintahan Jokowi-Jk telah mencanangkan dan melaksanakan program “Nawacita” yang salah satu agendanya adalah revolusi karakter bangsa atau sering

² Pasal 5 Undang-Undang no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

³ <http://www.mediaindonesia.com/news/read/122587/kualitas-sdm-indonesia-meningkat/2017-09-15>

dikenal dengan “revolusi mental”. Arah program tersebut adalah kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Agenda revolusi mental dalam Nawacita dilaksanakan berdasarkan amanat pasal 35 ayat (3) Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dimana setiap kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan diterbitkannya peraturan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Implementasinya adalah surat edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan nomor 435/B/SE/2016 tentang himbauan penggunaan bahan Bahan Ajar/ Materi mata kuliah wajib sebagai salah satu sumber Bahan Ajar/ Materi dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Pengaturan secara empat mata kuliah wajib umum (MKWU) tersebut, khususnya pendidikan kewarganegaraan merupakan bentuk penguatan karakter bangsa Indonesia dalam rangka menghadapi era globalisasi yang mengancam keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercermin dalam “Nawacita”.

Revitalisasi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sebagai bagian dari “Nawacita” Jokowi-Jk harus memiliki satu kesatuan capaian pembelajaran mata kuliah, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah merumuskan sebagai berikut:

- a. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan dan cinta tanah air
- b. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung demokrasi berkeadaban
- c. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung kesadaran hukum dan toleransi dalam keberagaman⁴

Ketercapaian pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan akan membentuk karakter nasionalisme dan patriotisme yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai idiologi negara, meregenerasi demokrasi ke-Indonesia-an, dan menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Setiap perguruan tinggi harus berpedoman pada capaian pembelajaran tersebut sebagai acuan penyelenggaraan perkuliahan pendidikan kewarganegaraan secara nasional.

Posisi perguruan tinggi keagamaan Islam di bawah naungan kementerian agama Republik Indonesia memiliki otonomi tersendiri sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (4) undang undang no 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. namun dalam pelaksanaannya khususnya di bidang pembelajaran maka

⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Bahan Modul Kuliah Kewarganegaraan*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2012). h. vi

terdapat beberapa hal/ aturan yang menginduk/ berkoordinasi dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, tidak terkecuali aturan tentang mata kuliah wajib umum seperti Pendidikan Kewarganegaraan.

Keberadaan kementerian agama sendiri merupakan keunikan di Indonesia. Hampir seluruh pemerintahan di dunia tidak ada satu kementerian yang secara khusus mengurus tentang agama dan keagamaan tersebut. Bahkan di negara-negara Timur Tengah juga tidak didapati kementerian khusus yang mengurus agama dan keagamaan, apalagi adanya lembaga dalam kementerian yang khusus mengatur pendidikan. Inilah kekhususan Negara Indonesia dibanding negara lain, dalam kaitannya dengan keberadaan kementerian agama. Keberadaan kementerian agama di dalam jajaran pemerintahan di Indonesia memang memiliki sejarah yang khusus. Keberadaan kementerian ini adalah sebagai imbalan khusus bagi umat Islam sebagai bagian atas perjuangan kemerdekaan yang dilakukannya. Jadi bukan semata-mata kebutuhan akan pengurusan kehidupan agama dan keagamaan, akan tetapi lebih jauh dari itu. Umat Islam diberi tempat secara structural di dalam pemerintahan yang pernah diperjuangkannya. Semenjak awal kementerian ini memang telah mengelola lembaga pendidikan, mulai dari madrasah diniyah sampai perguruan tinggi. Seirama dengan tuntutan perubahan social, maka wewenang kementerian agama di dalam dunia pendidikan juga semakin kuat. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang dikelola oleh kementerian agama. Tidak hanya pesantren dengan

segala kepentingannya, akan tetapi juga pendidikan berbasis pengetahuan umum dan keagamaan sekaligus⁵.

Dalam kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib umum di pendidikan tinggi khususnya keagamaan Islam, dibawah naungan kementerian agama, maka substansi materi pembelajarannya pun perlu disinergikan dengan kajian ke-Islam-an. Hal tersebut merupakan kekhasan yang membedakannya dengan perguruan tinggi umum. Kajian ke-Islam-an yang dimaksud adalah syariat Islam dan perkembangan kebudayaannya di Indonesia.

Merespon kebutuhan akan bahan/ materi ajar pendidikan kewarganegaraan dalam rangka meningkatkan pendidikan karakter bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai ke-Islam-an maka peneliti akan mencoba menghadirkan Bahan Ajar/ Materi pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya terintegrasi dengan nilai-nilai ke-Islam-an. Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti mengajukan proposal penelitian yang berjudul: **Pengembangan Bahan Ajar/ Materi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengembangan Bahan Ajar/ Materi pendidikan kewarganegaraan terintegrasi dengan nilai-nilai ke-Islam-

⁵ <http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=2946>

an pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di PTKI khususnya di IAIN Metro?

2. Apakah Bahan Ajar/ Materi pendidikan kewarganegaraan terintegrasi dengan nilai-nilai ke-Islam-an layak digunakan di PTKI khususnya di IAIN Metro ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan Bahan Ajar/ Materi pendidikan kewarganegaraan terintegrasi dengan nilai-nilai ke-Islam-an pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di PTKI khususnya di IAIN Metro
2. Untuk mengetahui apakah Bahan Ajar/ Materi pendidikan kewarganegaraan terintegrasi dengan nilai-nilai ke-Islam-an pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan layak digunakan di PTKI khususnya di IAIN Metro

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis untuk mengembangkan konsep kajian keilmuan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai bagian dari disiplin Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) khususnya berkaitan dengan materi pendidikan nilai, moral dan karakter bangsa. Penelitian ini juga sekaligus menunjukkan kekhasan PTKI dengan terintegrasinya nilai ke-Islam-an dan Ke-Indonesia-an

1.4.2. Manfaat Praktis

Selain kebermanfaatannya secara teoritis, penelitian ini juga memiliki kebermanfaatannya secara praktis yaitu:

- a. Mahasiswa, yaitu sebagai bahan kajian pendidikan karakter kebangsaan yang berbasis nilai ke-Islam-an untuk membentuk umat Islam yang baik dan cerdas (*good and smart moslems*)
- b. Dosen, yaitu sebagai bahan pedoman pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi keagamaan Islam.
- c. *Stakeholders*, yaitu dapat dijadikan sebagai Bahan Ajar/ Materi rujukan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi keagamaan Islam.

1.5. Spesifikasi Produk yang Akan Dikembangkan

Produk akhir yang akan dikembangkan dalam penelitian ini berupa Bahan Ajar/ Materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi keagamaan Islam. Bahan ini berisi tentang materi pendidikan kewarganegaraan yang disinergikan dengan nilai-nilai/ kajian ke-Islam-an.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Deskripsi Teori

Pada bagian ini akan dipaparkan teori terkait dengan pengembangan produk yang akan di hasilkan. Teori tersebut meliputi: 1) Pengembangan bahan/ materi ajar; 2) Pendidikan kewarganegaraan;

2.1.1. Pengembangan Bahan Ajar/ Materi

Bahan Ajar/ Materi merupakan salah satu bagian terpenting dari proses pembelajaran dan menentukan sukses atau gagalnya proses tersebut. Adanya Bahan Ajar/ Materi akan membuat pembelajaran memiliki acuan dasar materi yang akan di belajarkan. Dengan acuan dasar tersebut maka pendidik dan peserta didik dapat dengan mudah mencari suplemen materi pembelajaran untuk memperkaya khazanah wawasan dan pengetahuannya. Pendidik atau dalam hal ini adalah dosen dinilai cakup dalam mengembangkan bahan/ materi ajar sendiri yang disesuaikan dengan kurikulum, kebutuhan mahasiswa, dan kekhasan lingkungannya. Hal ini merupakan turunan dari pasal 51 ayat (1) huruf d, undang undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menyatakan bahwa dosen memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka Bahan Ajar/ Materi merupakan segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari

kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran⁶. Pengembangannya salah satu bentuk keleluasaan mimbar akademik dosen karena hanya dosen yang bersangkutan yang mengetahui karakteristik materi dan pembelajaran yang dilakukannya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan Bahan Ajar/ Materi, yakni:

- a. Bahan Ajar/ Materi hendaknya memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, dan pembelajaran;
- b. Bahan Ajar/ Materi hendaknya bisa membuat para mahasiswa senang dalam proses belajar mengajar;
- c. Bahan Ajar/ Materi hendaknya mampu membantu para mahasiswa mengembangkan kepercayaan diri sehingga mereka berani untuk berkomunikasi dengan siapa saja;
- d. Bahan Ajar/ Materi hendak relevan dan tepat guna;
- e. Bahan Ajar/ Materi hendaknya bisa memfasilitasi siswa untuk belajar mandiri;
- f. Bahan Ajar/ Materi mempermudah mahasiswa memperoleh poin-poin yang diajarkan;
- g. Bahan Ajar/ Materi hendaknya memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk menggunakan bahasa target untuk mencapai tujuan-tujuan komunikatif;

⁶ Andi Prastowo, *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar/ Materi Inovatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2011) h. 17

- h. Bahan Ajar/ Materi harus dipertimbangkan bahwa para siswa memiliki gaya belajar dan sikap yang berbeda;
- i. Bahan Ajar/ Materi seharusnya memberikan feedback;
- j. Bahan Ajar/ Materi seharusnya tidak bergantung pada latihan yang terkontrol.⁷

Karakteristik Bahan Ajar/ Materi tersebut mengisyaratkan bahwa Bahan Ajar/ Materi berisikan seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau sub kompetensi dengan segala kompleksitasnya. Untuk lebih memudahkan memahami buku ajar, maka karakteristik buku ajar dapat disimpulkan menjadi 5 point, yaitu:

- a. *self instructional*, artinya Bahan Ajar/ Materi harus bisa digunakan oleh peserta didik secara mandiri. Buku ajar harus memberikan kemudahan peserta didik untuk menyelesaikan tugasnya. Oleh karena itu, buku ajar harus memiliki tujuan yang jelas, materi yang spesifik, pemaparan materi yang jelas, ada latihan dan tugas, kontekstual, bahasa sederhana dan komunikatif, ada rangkuman, assessment, umpan balik, dan ada rujukan.
- b. *self contained*, artinya berisi penjabaran materi dari kompetensi dan sub kompetensi.

⁷ Richards, *Curriculum Development in Language Teaching*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2001) h.263.

- c. *stand alone*, artinya mampu bertahan sendiri dan tidak membutuhkan bantuan dari Bahan Ajar/ Materi lainnya.
- d. Adaptif, artinya fleksibel dengan mengikuti perkembangan IPTEK.
- e. *user friendly*, artinya memudahkan pengguna dalam memakainya⁸.

Prastowo menambahkan bahwa pengembangan suatu Bahan Ajar/ Materi hendaknya mempertimbangkan 3 prinsip yaitu:

- a. Relevansi, yaitu keterkaitan Bahan Ajar/ Materi dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang bersangkutan.
- b. Konsistensi, yaitu kejelasan Bahan Ajar/ Materi dalam menjabarkan secara rinci indikator materi pembelajaran
- c. Kecukupan, yaitu materi harus cukup memadai untuk membantu peserta didik mencapai capaian pembelajaran mata kuliah. materi tidak boleh 'kegemukan' karena cenderung bertele-tele dan membuat siswa bosan, materi juga tidak boleh terlalu 'kurus' karena akan membuat kesulitan siswa memahami tujuan pembelajaran⁹.

⁸ Ika Lestari. *Pengembangan Bahan Ajar/ Materi Berbasis Kompetensi*. (Padang: Akademia, 2013). h.1-2

⁹ Andy Pratowo, *pengembangan Bahan Ajar/ Materi Tematik –Panduan Lengkap Aplikatif*. (Yogyakarta: DIVA Press, 2013). h.317

Berdasarkan dari karakteristik dan prinsip pengembangan Bahan Ajar/ Materi yang dikemukakan Lestari dan Prastowo, maka Muslich mengemukakan standar kelayakan Bahan Ajar/ Materi yang meliputi:

- a. Kelayakan isi, materi pembelajaran harus spesifik, jelas, akurat, dan mutakhir dari segi penerbitan. Perincian harus memperhatikan keseimbangan sebaran materi pembelajaran, pengembangan dan *inquiry*-nya, serta tidak boleh tumpang tindih dan multi tafsir karena penjelasan materi harus rinci dan tidak menimbulkan multitafsir. Untuk mengatasi hal tersebut kelayakan isi memiliki tiga indikator yang harus diperhatikan yaitu kesesuaian materi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, keakuratan materi, dan materi pendukung pembelajaran.
- b. Kelayakan penyajian materi, hal ini meliputi keteraturan urutan dalam penguraian, kemudahan dipahami, kemenarikan minat dan perhatian serta keaktifan siswa, kesesuaian bahan, maupun latihan dan soal disetiap akhir sajian per bab. Untuk mengatasinya kelayakan ini memiliki tiga indicator yang harus dipahami yaitu teknik penyajian, penyajian pembelajaran, dan kelengkapan penyajian.
- c. Kelayakan bahasa, bahasa yang digunakan dalam mengembangkan materi pembelajaran harus memperhatikan gaya dan tingkat kemudahan bahasa (kosakata, kalimat, paragraf, dan wacana) pembacanya namun tanpa melanggar kaidah

pedoman penulisan karya ilmiah. Hal ini memiliki beberapa indikator yang harus diperhatikan yaitu kesesuaian pemakaian bahasa dengan tingkat perkembangan siswa, pemakaian bahasa yang komunikatif, dan memenuhi syarat keruntutan dan keterpaduan alur berpikir.

- d. Kelayakan kegrafikan, aspek ini meliputi kesesuaian fisik buku, seperti ukuran buku, kertas, cetakan, ukuran huruf, warna, ilustrasi, dan lain-lain. Untuk mengarahkan kelayakan grafik maka indikator yang perlu diperhatikan meliputi bentuk, desain kulit, dan desain isi¹⁰.

Pengembangan Bahan Ajar/ Materi diperlukan agar ketersediaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, tuntutan kurikulum, karakteristik sasaran, dan tuntutan pemecahan masalah belajar. Pengembangan Bahan Ajar/ Materi harus sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dalam pengembangan Bahan Ajar/ Materi pendidikan kewarganegaraan ini disesuaikan dengan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dimana Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah merumuskan capaian pembelajaran mata kuliahnya bahkan telah membuat acuan modul pembelajarannya. Selanjutnya, karakteristik sasaran disesuaikan dengan lingkungan kampus yang notabene berada dalam naungan kementerian agama republik Indonesia.

¹⁰Masnur Muslich, *Text Book Writing*, (Jogjakarta: Ar-ruz Media, 2010)

Kebutuhan dan tuntutan pemecahan masalah belajar disesuaikan dengan kemampuan, minat, dan latar belakang peserta didiknya.

2.1.2. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan atau disingkat PKN merupakan salah satu kajian keilmuan yang penting dan wajib di belajarkan disetiap jenjang pendidikan, baik di sekolah dasar maupun hingga perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan PKN memuat materi wawasan kebangsaan dan penguatan karakter bangsa dalam rangka membentuk warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizens*) sebagai bagian dari pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari dimensi kurikuler di kurikulum setiap jenjang pendidikan memiliki muatan tiga dimensi pokok pembelajaran yaitu sebagai pembelajaran kurikuler yang *include* dalam kurikulum seperti layaknya mata pelajaran/ kuliah lain, sebagai pembelajaran sosial politik yang membelajarkan hubungan warga negara dengan negara ataupun dengan sesama warga negara dan sebagai program akademik yang memiliki nilai dan prosedur edukatif dalam membelajarkannya

Memperhatikan perkembangan pemikiran tentang *civic* dan *civic education*, atas dasar kajian secara teoritik, Winataputra merumuskan pengertian "*civics, citizenship/civic education*" sebagai berikut:

- a. *"Civics is the study of government taught in the schools. It is an area of learning dealing with how democratic government has been and should be carried out, and how the citizen should carry out his duties and rights purposefully with full responsibility.*

b. *Civic/Citizenship education can be defined in two ways:*

1. *In the first sense, Civic Education is an area of learning, primarily intended to develop knowledge attitudes, and skills so the students become “good citizens, with learning experiences carefully selected and organized around the basic concepts of political science,*
2. *In another sense, Civic Education is a by-product of variety of areas of learning undertaken in and out-of formal school settings as well as a by-product of a complex network of human interactions in daily activities concerned with the development of civic responsibility¹¹”.*

Pendidikan kewarganegaraan adalah pembelajaran yang berisikan tentang pemerintahan demokrasi, dimana tujuan utamanya untuk mendidik warga negara melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Ketika kewarganegaraan masuk dalam ranah pendidikan, maka hal tersebut bertujuan mengembangkan sikap, keterampilan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik (*good citizen*), dimana mereka bisa mendapatkannya melalui pengalaman belajar konsep-konsep dasar ilmu politik. Juga dalam pendidikan kewarganegaraan, peserta didik dapat berinteraksi melalui kehidupan sehari-hari untuk berkembang menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

¹¹ Udin Sariipudin Winataputra. *Jati diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi, (Disertasi)*. (Bandung: UPI, 2001). h.131

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mencakup berbagai kajian seperti *citizenship*, *civics*, ilmu pengetahuan sosial, *life skills*, pendidikan moral, sejarah, geografi, ekonomi, hukum, politik, lingkungan hidup, dan pendidikan nilai¹².

Di perguruan tinggi terdapat berbagai landasan kuat tentang penyelenggaraan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah

- a. Agama,
- b. Pancasila,
- c. Kewarganegaraan,
- d. Bahasa Indonesia.

Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) juga ditegaskan melalui Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa salah satu bentuk wujud keikutsertaan warga negara dalam bela negara adalah keikutsertaan warga negara dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini menyiratkan bahwa materi pendidikan kewarganegaraan harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa terutama generasi muda dengan disesuaikan dengan latar belakang suku, agama, dan atau bahkan ras.

Hal senada juga ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, bahwa capaian pembelajaran umum bagi semua jenjang pendidikan antara lain adalah berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air

¹² D Kerr. *Citizenship Education: an International Comparison*. (England: NFER, 1999). h.2

serta mendukung perdamaian dunia, menghargai keanekaragaman budaya, menjunjung tinggi penegakkan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas. Indikator-indikator tersebut sesungguhnya adalah tujuan substantif dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini sejalan pula dengan Sembilan Agenda Prioritas atau “Nawacita” sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, khususnya pada butir ke delapan, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa¹³.

Menyikapi pengembangan materi PKn yang diserahkan pada masing-masing perguruan tinggi yang dapat menyebabkan kebingungan para pelaksana kebijakan (dosen) yang akan mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan, yang dapat menyebabkan konten perkuliahan tidak standar, berbeda antara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lainnya sehingga spirit dan tujuan sesungguhnya dari mata kuliah PKn tidak tercapai. Maka Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti merumuskan capaian pembelajaran lulusan (CPL) mata kuliah kewarganegaraan sebagai berikut:

- a. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan dan cinta tanah air

¹³ Kemenristekdikti. *Panduan Bimbingan Teknis Dosen MKU Kewarganegaraan*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Sumberdaya IPTEK dan Pendidikan Tinggi, 2017). h.1

- b. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung demokrasi berkeadaban
- c. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung kesadaran hukum dan toleransi dalam keberagaman¹⁴

Dalam rangka mencapai CPL tersebut, maka Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti juga meramu materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi antara lain:

- a. Identitas Nasional
- b. Integrasi Nasional
- c. Konstitusi
- d. Hak dan Kewajiban Warga Negara
- e. Demokrasi
- f. *Rule Of Law*
- g. Wawasan Nusantara
- h. Ketahanan Nasional dan Bela Negara¹⁵

Kesemua materi tersebut ditutup dengan sebuah tugas akhir berupa *project citizen* yang mencerminkan keutuhan pemahaman peserta didik terhadap keseluruhan materi yang telah dibelajarkan.

Adanya perguruan tinggi keagamaan Islam dibawah naungan kementerian agama Republik Indonesia sebagai sebuah kekhususan struktur pelayanan pemerintahan, maka pendidikan

¹⁴ ibid

¹⁵ Kemenristekdikti. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, cetakan I.* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016).

kewarganegaraan di perguruan tinggi sebagai dimensi pembelajaran kurikuler, social politik, dan program akademik, dituntut menyesuaikan substansi kajiannya dengan mensinergikan dengan nilai-nilai ke-Islam-an dalam rangka membentuk pribadi generasi muda muslim yang baik dan cerdas (*good and smart moslem*). Hal ini juga merupakan bagian dari usaha dunia pendidikan untuk menangkal radikalisme dan terorisme yang dewasa ini melekat sebagai sebuah *stereotype* bagi umat Islam, karena bila generasi muslim mampu mensinergikan pemahaman syariat Islam dengan pemerintahan negara maka akan menciptakan keharmonisan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perguruan tinggi merupakan lingkungan sebagai sebuah tempat proses pembudayaan, sekaligus sebagai lingkungan kedua bagi mahasiswa dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak. Nuansa dan atmosfer pendidikan tinggi keagamaan Islam yang ditunjang dengan materi pembelajaran khususnya pendidikan kewarganegaraan yang bersinergi dengan syariat Islam akan mendukung upaya untuk menginternalisasikan nilai dan etika Islam yang *rahmatan lil alamin*, termasuk sinergi nilai keagamaan dan nilai politik penyelenggaraan Negara akan lebih efektif dan efisien.

2.2. Penelitian Relevan

Studi atau hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Matriks Penelitian Yang Relevan

No	Nama	Judul Penelitian/ Publikasi/ Tahun	Hasil Analisis	Perbedaan Dengan Penelitian yang dilaksanakan
1.	Winarno	Pengembangan Bahan Ajar/ Materi pendidikan kewarganegaraan berbasis pilar kebangsaan di perguruan tinggi/ Dipublikasikan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto ISBN: 978-602-14930-3-8/ 2015	Winarno memaparkan bahwa Bahan Ajar/ Materi (materi pembelajaran) PKn perguruan tinggi sampai saat ini masih merujuk pada Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43 Tahun 2006. Keluarnya amanat Undang-Undang tentang perlunya empat pilar kebangsaan sebagai materi pokok pokok kajian di PKn perguruan tinggi tidak merubah bab-bab secara mendasar pada isi buku teks PKn. Perubahan dan perkembangan yang ada dilihat sebagai hal-hal konseptual yang bernilai dan dapat diintegrasikan	Pertama, Pengembangan Bahan Ajar/ Materi Pendidikan Kewarganegaraan yang dilakukan Winarno masih merujuk pada SK Dirjen Dikti No. 43 Tahun 2006, sedangkan penelitian ini telah merujuk pada aturan terbaru berdasarkan Surat Edaran Dirjen Belmawa Kemenristek dikti no: 435/B/SE/2016 yang memperkuat wahana pendidikan karakter bangsa Indonesia dalam menghadapi Globalisasi dan MEA. Kedua, pengembangan Bahan Ajar/ Materi yang dilakukan Winarno belum memberikan corak ke-Islam-an yang kental sehingga belum relevan untuk dijadikan

			<p>kedalam bab-bab yang telah ada. Buku teks PKn berjudul “Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi” terbitan Ombak Yogyakarta, Januari 2015, ISBN: 798-602-258-267-0 dapat dikatakan layak untuk dipergunakan sebagai buku teks pembelajaran PKn. Namun demikian, agar lebih memenuhi standar idel sebuah buku teks perlu revisi pada sajian buku terutama penggunaan bahasa yang baik dan efektif, ilustrasi gambar, konteks kasus yang sejalan dengan materi bab, dan penggunaan referensi yang terbaru.</p>	<p>rujukan di PTKI, sedangkan dalam penelitian pengembangan ini materi-materi yang mempunyai potensi yang kuat akan dikaitkan dengan nilai-nilai Islam ke-Indonesia-an.</p> <p>Ketiga, produk hasil pengembangan Bahan Ajar/ Materi PKn hanya diperuntukan untuk perguruan tinggi umum sedangkan penelitian ini akan menghasilkan Bahan Ajar/ Materi PKn untuk Perguruan tinggi keagamaan Islam</p>
--	--	--	--	--

2.	Ahmad Fikri Hadin & Reja Fahlevi	Desain Bahan Ajar/ Materi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi/ dipublikasikan Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol.1, No.2, Desember 2016 / 2016	Hadin dan Fahlevi mengisyaratkan bahwa Pendidikan antikorupsi merupakan kebijakan pendidikan yang tidak bisa lagi ditunda pelaksanaannya di perguruan tinggi secara formal. Jika dilaksanakan sebagaimana mestinya maka dalam jangka panjang pendidikan antikorupsi akan mampu berkontribusi terhadap upaya pencegahan terjadinya tindakan korupsi, sebagaimana pengalaman negara lain. Bahan Ajar/ Materi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Pendidikan Anti Korupsi perlu diimplementasikan di semua Universitas di seluruh	Pertama, Penelitian Hadin dan Fahlevi ini lebih menekankan pada karakter anti korupsi dan belum mengisyaratkan pengembangan nilai-nilai keagamaan Islam ke-Indonesia-an sebagai mana dalam penelitian ini. Sehingga masih belum relevan digunakan di PTKI Kedua, produk hasil pengembangan Bahan Ajar/ Materi PKn hanya diperuntukan untuk perguruan tinggi umum sedangkan penelitian ini akan menghasilkan Bahan Ajar/ Materi PKn untuk Perguruan tinggi keagamaan Islam
----	----------------------------------	---	--	--

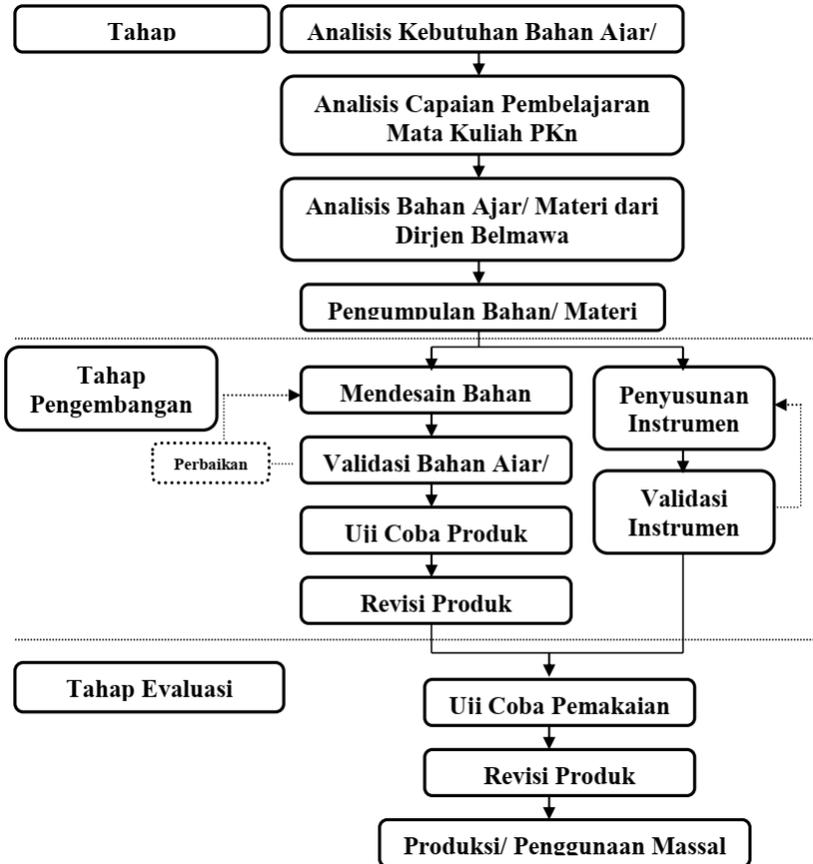
			<p>Indonesia, materi ajar seperti ini adalah tidak hanya menitikberatkan kepada pengetahuan (knowledge) semata, melainkan juga membekali mahasiswa keterampilan-keterampilan seperti menganalisis dan berfikir kritis (<i>analytical & critical thinking</i>) sehingga akan membentuk keterampilan-keterampilan <i>experiential learning</i> yang lain , selain itu focus utama materi ajar ini adalah pembentukan dan kaderisasi mahasiswa yang terampil, berpengalaman dan berkarakter.</p>	
--	--	--	---	--

3.	Emil El Faisal dan Sulkipani	Pengembangan Bahan Ajar/ Materi Berbasis Muatan Lokal Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan / dipublikasikan Jurnal Civics Volume 13 Nomor 2, Desember 2016 / 2016	Emil dan Faisal menyimpulkan bahwa Keberhasilan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan mencerminkan peserta didik yang sadar dan menghidupkan nilai-nilai lokal dalam masyarakat karena nilai-nilai muatan lokal yang diintegrasikan dalam pendidikan kewarganegaraan sangat berperan dalam mengukuhkan jati diri bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional di tengah peradaban dunia. Eksistensi muatan lokal dapat memberikan kesadaran dan keinginan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk menumbuh	Pertama, Penelitian Emil dan Faisal ini lebih menekankan pada Materi muatan lokal tanpa mengisyaratkan pengembangan nilai-nilai Islam ke-Indonesia-an sebagai mana dalam penelitian ini. Sehingga masih belum relevan digunakan di PTKI Kedua, produk hasil pengembangan Bahan Ajar/ Materi PKn hanya diperuntukan untuk perguruan tinggi umum sedangkan penelitian ini akan menghasilkan Bahan Ajar/ Materi PKn untuk Perguruan tinggi keagamaan Islam
----	------------------------------	--	--	--

			kembangkan kecintaan terhadap bangsa dan negara Indonesia <i>(nasionalisme)</i> . Untuk mewujudkan hal	
--	--	--	---	--

2.3. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dikembangkan sebagai berikut sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian Pengembangan

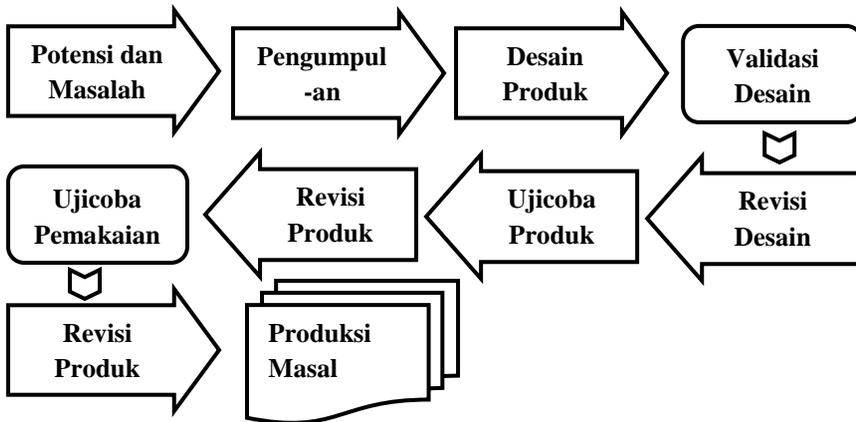
Berdasarkan tujuan yang telah dijabarkan dan dalam rangka menghasilkan produk berupa buku ajar pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam, maka peneliti akan menggunakan metode Penelitian dan Pengembangan (*Research and Development*) untuk mengintegrasikan materi pendidikan kewarganegaraan dengan nilai-nilai ke-Islam-an. Penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut¹⁶. Produk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku ajar pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi keagamaan Islam dibawah naungan kementerian agama Republik Indonesia.

Model penelitian dan pengembangan yang akan diterapkan dalam penelitian ini yaitu model penelitian dan pengembangan yang diadopsi dari langkah-langkah yang diajukan oleh Sugiyono. Menurut Sugiyono ada sepuluh (10) langkah dalam penelitian dan pengembangan yaitu: 1) Potensi dan masalah; 2) Pengumpulan data; 3) Desain produk; 4) Validasi desain; 5) Revisi desain; 6) Ujicoba produk; 7) revisi produk; 8) ujicoba pemakain; 9) revisi produk dan 10) produksi masal.

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi langkah penelitian dan pengembangan hanya sampai langkah ke Sembilan yaitu

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.407

revisi produk dan belum sampai pada produksi massal Karena keterbatasan peneliti dan waktu. Gambar langkah-langkah pengembangan produk dapat dilihat dengan jelas pada gambar 3.1 berikut.¹⁷



Gambar 3.1 Langkah-langkah Pengembangan Produk

Berdasarkan skema gambar di atas dapat dijabarkan langkah-langkah pengembangan produk sebagai berikut:

1. Potensi dan Masalah

Masalah yang dapat digali dan dijadikan potensi untuk dapat didayagunakan dalam penelitian ini yaitu belum tersedia buku ajar pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan nilai-nilai Ke-Islam-an yang dibelajarkan di perguruan tinggi.. Buku ajar ini merupakan komponen yang penting dalam penguasaan materi pendidikan kewarganegaraan di PTKI, karena karekteristiknya yang khas karena berbasis nilai-nilai keagamaan Islam.

¹⁷ Ibid

2. Pengumpulan Informasi

Guna mendapatkan data yang dapat dijadikan bahan untuk membuat sebuah produk berupa buku ajar yang baik sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan tujuan pembelajaran maka dilakukan pengumpulan informasi-informasi yang dapat dijadikan pijakan dalam mendesain produk. Informasi awal dalam penelitian ini dapat diperoleh dari dosen pengampu mata kuliah, mahasiswa, buku kurikulum dan pakar pendidikan kewarganegaraan melalui observasi dan wawancara langsung.

3. Desain Produk

Pada tahapan ini peneliti akan membagi dalam tiga tahap yaitu: perencanaan produk, penentuan materi dan pembuatan produk. Pada tahap rancangan produk dibuat rancangan dari awal hingga akhir secara terperinci. Pada tahap penentuan materi, peneliti melakukan pengumpulan bahan-bahan materi dari berbagai sumber dengan menyesuaikan kurikulum mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pada tahap pembuatan produk akan dibuat buku ajar yang terintegrasi dengan nilai-nilai ke-Islam-an.

4. Validasi Desain

Pada tahap validasi desain ini dilakukan uji kelayakan produk yang telah dibuat. Uji kelayakan produk ini meliputi uji validasi dari ahli media, ahli materi yang telah memiliki kualifikasi dan kompetensi keilmuan dalam bidangnya, serta uji validasi dari teman sejawat.

5. Revisi Desain

Pada tahap ini peneliti akan melakukan perbaikan setelah produk divalidasi oleh ahli media dan ahli materi. Revisi produk didasarkan pada saran dan masukan dari masing-masing ahli.

6. Uji coba Produk

Pada ujicoba produk pada tahap ini dilakukan kepada sampel terbatas yaitu mahasiswa pada semester ganjil program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial yang mengambil mata kuliah pendidikan kewarganegaraan berjumlah 30 orang. Tujuan dari ujicoba produk untuk mengetahui masukan dari mahasiswa terhadap produk yang telah dikembangkan.

7. Revisi Produk

Revisi produk tahap ini didasarkan pada hasil ujicoba produk terbatas kepada sampel terbatas yaitu masukan dari mahasiswa namun juga tetap mempertimbangkan masukan dan saran dari ahli media dan ahli materi.

3.2. Subject Penelitian

Pada penelitian pengembangan ini, ada dua subyek penelitian yaitu *expert judgement* atau Ahli/ pakar dan user yaitu pengguna produk. Berikut adalah penjelasan berkaitan dengan subect penelitian.

1. Subyek *expert judgement* dari Ahli/ Pakar

Ahli/ Pakar yang akan digunakan yaitu ahli/ pakar untuk menganalisis kebutuhan, ahli materi, ahli media, dan

praktisi/teman sejawat. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

- a. Analisis kebutuhan dilakukan dengan melibatkan subjek yaitu mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di IAIN Metro.
 - b. Analisis isi dan sajian materi dilakukan dengan subjek yaitu, ketua program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Hermi Yanzi, M.Pd), Dosen/ Ahli Kewarganegaraan dan Budaya (Deri Ciciria, M.Hum), dosen/ pakar pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta (Mohammad Maiwan, Ph.D/ Sujarwo, M.Pd) dan ahli materi keagamaan Islam/ tafsir Hadist (Sri Handayana, M.Hum).
 - c. Analisis kebahasaan dilakukan dengan subjek adalah dosen/ pakar pendidikan bahasa Indonesia (Dr (C) Andri Wicaksono, M.Pd)
 - d. Analisis grafis dilakukan oleh tim editing, percetakan dan penerbit Laduny
2. User/ pengguna

Subyek pengguna (*user*) dalam penelitian ini yaitu salah satu kelas yang mengambil mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di IAIN Metro.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data dalam penelitian ini dapat berupa hasil analisis kebutuhan, data hasil validasi ahli, data hasil ujicoba produk, dan ujicoba pemakaian yang berupa masukan, tanggapan, kritik, saran, serta perbaikan terhadap produk. Data yang diperoleh dalam tahap validasi dan ujicoba akan digunakan untuk memberikan masukan dalam merevisi dan menilai kualitas produk berupa buku ajar yang akan dikembangkan. Sumber data berasal dari subject uji coba yang meliputi ahli materi, ahli media, ahli kebahasaan, ahli grafis dan pengguna produk yaitu mahasiswa. Jenis data dapat berupa hasil observasi/ pengamatan, hasil wawancara, hasil questioner. Berikut adalah jenis dan sumber data yang diperoleh dalam proses penelitian.

Tabel 3.1 Jenis dan Sumber Data

No.	Subyek Ujicoba	Aspek Penilaian
1.	Ahli Materi	a. kelayakan materi b. kelayakan referensi/ rujukan. c. kelayakan penyajian,
2.	Ahli Bahasa	a. kelugasan, ketepatan, dan kebakuan bahasa yang digunakan b. pemakaian bahasa yang komunikatif
3.	Ahli Desain Grafis/ Media	a. Desain/ Bentuk Buku b. Desain Sampul/ Cover c. Desain Isi Buku
4.	Mahasiswa/ Pengguna	a. Ketertarikan b. Tingkat Kesulitan Materi c. Kebermanfaatan d. Bahasa

3.4. Instrumen Pengumpulan Data

Ada beberapa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah kuesioner (angket), wawancara, lembar observasi dan tes.

1. Kuisisioner (Angket)

Kuisisioner (Angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya¹⁸. Dalam penelitian ini kuisisioner yang digunakan untuk mendapatkan tanggapan/ penilaian dari para ahli dan subyek ujicoba yang berupa data kualitatif terhadap produk pengembangan. Bentuk kuisisioner yang digunakan meliputi:

a. Kuisisioner analisis kebutuhan

Kuisisioner ini berisi tentang aktivitas pembelajaran yang berlangsung, kendala yang dihadapi selama penggunaan proses pembelajaran. Kuisisioner analisis kebutuhan ditujukan kepada mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah. Hasil kuisisioner ini digunakan untuk dasar dalam pembuatan produk.

b. Kuisisioner validasi ahli

Kuisisioner ditujukan kepada para ahli, yaitu ahli materi pembelajaran, ahli kebahasaan dan ahli media. Kuisisioner validasi ahli diberikan pada saat validasi desain sebelum dilaksanakan ujicoba produk kepada sampel terbatas. Kuisisioner validasi ahli digunakan untuk memperoleh data kualitatif berupa tanggapan, masukan,

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.142

komentar dan saran yang berkaitan dengan desain dan tampilan buku yang akan dikembangkan. Validasi ahli materi digunakan untuk mengungkap kelayakan materi, kelayakan referensi/ rujukan dan kelayakan penyajian,

Validasi ahli bahasa digunakan untuk mengungkap kelugasan, ketepatan, dan kebakuan bahasa yang digunakan, serta pemakaian bahasa yang komunikatif

Validasi ahli media digunakan untuk mengungkap desain/ bentuk buku, desain sampul/ cover, dan desain isi buku. Hasil data akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan revisi desain produk awal sebelum dilakukan ujicoba. Kuisisioner bertujuan untuk menilai buku yang dikembangkan sudah sesuai dan memenuhi syarat menurut para ahli.

c. Kuisisioner tanggapan/penilaian ujicoba produk

Kuisisioner tanggapan/ penilaian ujicoba ditujukan kepada mahasiswa dan dosen IAIN Metro yang mengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sebagai sampel penelitian.

Kuisisioner mahasiswa digunakan untuk mengungkap data tentang ketertarikan, tingkat kesulitan materi, kebermanfaatan, dan bahasa. Sedangkan kuisisioner praktisi/ teman sejawat digunakan untuk menilai kelayakan isi dan penyajian materi, kelayakan bahasa, dan kelayakan media. Hasil data akan dijadikan dasar dalam melakukan revisi produk jika diperlukan, sehingga hasil produk setelah dilakukan ujicoba benar-benar layak untuk digunakan dalam pembelajaran.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti lebih mendasar dan jumlah respondennya sedikit.¹⁹ Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan pembelajaran Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang berlangsung di IAIN metro.

3. Lembar Observasi

Lembar observasi digunakan untuk mengamati kegiatan belajar siswa selama menggunakan produk buku ajar hasil pengembangan. Untuk mengetahui bagaimana respon ketika mengerjakan latihan di kelas, kesulitan pada saat mengerjakan, aktivitas selama mengerjakan, suasana kelas yang timbul ketika mengerjakan soal latihan.

3.5. Teknik Analisis Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa data kualitatif dan kuantitatif sehingga untuk menganalisis data tersebut peneliti akan menggunakan metode analisis data kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan data yang dikumpulkan. Berikut adalah penjelasan terkait dengan teknik analisis data berdasarkan data yang akan diperoleh.

1. Teknik Analisis Kualitatif

Teknik ini digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari analisis kebutuhan, validator para ahli, uji

¹⁹ Ibid, hal. 137

coba produk dan ujicoba pemakaian berupa tanggapan, masukan, kritik dan saran yang digunakan untuk merevisi produk. Pengolahan data dengan menggunakan teknik diskriptif kualitatif.

2. Teknik Analisis Kuantitatif

Data yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif adalah data analisis kebutuhan yang dikuantitatifkan, data angket penilaian/tanggapan ujicoba produk, dan data hasil belajar. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif dan inferensial.

a. Data Analisis kebutuhan

Data analisis kebutuhan dianalisis dengan menggunakan rumus persentase sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum ni}{N} \times 100\%$$

Keterangan: K = Persentase skor yang diperoleh,

$\sum ni$ = Jumlah skor yang diperoleh,

N = Adalah jumlah skor maksimal.

Hasil perhitungan digunakan sebagai data untuk mendeskripsikan hasil analisis kebutuhan.

b. Data hasil validasi ahli materi, kebahasaan dan media

Data hasil validasi ahli, praktisi dan teman sejawat dihitung dan dikategorikan kedalam rentang nilai kedalam 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik.

c. Data penilaian atau tanggapan ujicoba

Data penilaian atau tanggapan dari ujicoba pemakaian produk dianalisis dengan menggunakan rumus:

$$K = \frac{\sum ni}{N} \times 100\%$$

Keterangan: K = Persentase skor yang diperoleh,

$\sum ni$ = Jumlah skor yang diperoleh,

N = Adalah Jumlah skor maksimal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dalam penelitian ini meliputi 2 sub pembahasan yaitu: 1) hasil analisis kebutuhan dosen dan mahasiswa terhadap Bahan Ajar/ Materi pendidikan kewarganegaraan di PTKI. 2) prototype Bahan Ajar/ Materi pendidikan kewarganegaraan di PTKI. Analisis kebutuhan terhadap dosen dan mahasiswa digunakan untuk menggali kebutuhan berupa karakteristik materi keagamaan Islam sebagai sebuah ke khasan di PTKI, yang kemudian disinergikan dengan materi Pendidikan Kewarganegaraan. Prototype Bahan Ajar/ Materi merupakan rancang bangun materi awal berupa buku yang kemudian menjadi produk dasar pengembangan pada tahap selanjutnya.

4.1. Hasil Analisis Kebutuhan Dosen dan Mahasiswa Terhadap Bahan Ajar/ Materi Pendidikan Kewarganegaraan Di PTKI

4.1.1. Hasil Analisis Kebutuhan Dosen

Analisis kebutuhan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Bahan Ajar/ Materi Pendidikan Kewarganegaraan di PTKI dilakukan untuk memperoleh karakteristik materi keagamaan Islam yang cocok dan dapat bersinergi dengan materi Pendidikan Kewarganegaraan yang telah dirumuskan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan di edarkan sesuai himbauan nomor: 435/B/SE/2016.

Angket analisis kebutuhan diberikan kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Ibu Nety Hermawati, MH dan Susi Yulianti, MH dari IAIN Metro. Hasil angket analisis kebutuhan menunjukkan bahwa hakekatnya materi perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan telah di pelajari dari SD, SMP hingga SMA, sehingga diperguruan tinggi harus lebih menekankan pada nalar mahasiswa terhadap pemahaman/ pemecahan permasalahan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara (*problem solving*) yang di implementasikan dalam sebuah *project citizen*. Hal tersebut juga menghindari kejenuhan mahasiswa dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan, seperti yang selama ini terjadi. Metode ini relative lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan hasil pembelajaran karena ketika mereka melakukan sesuatu merupakan implementasi dari pemahaman materi yang dosen berikan. Kasus/ permasalahan aktual yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan menarik minat mahasiswa untuk dipecahkan bersama dengan kajian keilmuan kewarganegaraan yang ilmiah.

Dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di IAIN Metro berpedoman pada materi yang termuat dalam beragam buku referensi karangan antara lain:

1. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti dengan judul “Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi”,
2. Sumarsono dkk dengan judul “Pendidikan Kewarganegaraan”,
3. Srijanti dkk dengan judul “Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa”,
4. Kaelan dengan judul “Pendidikan Kewarganegaraan”, dan

5. Winarno dengan judul “Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi”.

Diluar buku induk tersebut, beberapa referensi penunjang seperti “Dasar-Dasar Ilmu Politik” karangan Miriam Budiarmo, dan “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” terbitan MPR RI juga digunakan. Secara umum, materi inti pendidikan Kewarganegaraan dalam beberapa referensi yang dibelajarkan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) Khususnya IAIN Metro antara lain:

1. Negara dan Sistem Pemerintahan
2. Identitas Nasional
3. Demokrasi
4. Hak dan Kewajiban Warganegara
5. Konstitusi dan *Rule Of Law*
6. Hak Asasi Manusia
7. Wawasan Nusantara/ Geopolitik
8. Ketahanan Nasional/ Geostrategi
9. Integrasi dan Konflik

Dosen pengampu mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan di IAIN Metro berpendapat bahwa materi ke-Islam-an sebagai ciri khas PTKIN memang harus dimunculkan pada perkuliahan/ pembelajaran. Hal ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman pada mahasiswa tentang peran Islam dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan pemahaman nilai-nilai kajian Islam yang universal, toleran, cinta damai, dan *rahmatan lil alamin* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemahaman ini akan semakin meneguhkan keimanan sekaligus memupuk jiwa nasionalisme dan patriotisme mahasiswa, sesuai dengan konsep *Hubbul Wathon Minal Iman*.

Selama ini buku pendidikan kewarganegaraan yang digunakan sebagai rujukan perkuliahan mahasiswa belum bersinergi dengan nilai-nilai ke-Islam-an sehingga dosen secara terpisah menambah rujukan lain terkait hal tersebut. Hal ini bertujuan agar karakter mahasiswa tidak hanya menjadi orang yang nasionalis dan patriotis namun juga harus religius dan toleran terhadap keberagaman serta menjunjung tinggi Ideologi Pancasila dengan semangat ke-Islam-an. Jika terdapat buku kewarganegaraan yang telah bersinergi dengan nilai-nilai ke-Islam-an tentu akan mempermudah dosen dalam perkuliahannya.

4.1.2. Hasil Analisis Kebutuhan Mahasiswa

Analisis kebutuhan mahasiswa terhadap Bahan Ajar/ Materi Pendidikan Kewarganegaraan di PTKI dilakukan untuk memperoleh masukan terkait materi dan pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan, serta memperoleh gambaran tentang potensi pengembangan Bahan Ajar/ Materi pendidikan Kewarganegaraan yang terintegrasi dengan kajian ke-Islam-an.

Untuk mengetahui kebutuhan mahasiswa akan materi pendidikan kewarganegaraan maka peneliti menyebarkan angket kepada 10 orang mahasiswa yang memiliki hasil belajar yang baik. Hasil angket menunjukkan bahwa dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan sulit dipahami karena materi tersebut luas, abstrak, dan sulit untuk diaplikasikan dalam pengalaman belajar mahasiswa. Sajian materi belum menuntun mahasiswa merefleksikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara nyata. Hal ini memberi kesan bahwa pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan bersifat teoritis dan hafalan. Padahal hakekatnya pendidikan Kewarganegaraan

menuntut pengalaman belajar mahasiswa yang nyata sehingga mampu memahami suatu karakter permasalahan ketatanegaraan secara utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu, materi perkuliahan pendidikan Kewarganegaraan harus disajikan dalam buku ajar secara padat, menarik, sistematis, problem solving, reflektif, dan dengan bahasa yang mudah dimengerti

Materi pendidikan Kewarganegaraan memiliki potensi yang cukup kuat untuk diintegrasikan dengan kajian ke-Islam-an sebagai jati diri PTKI. Hakekatnya nilai-nilai Islam sangat erat melekat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Materi negara dan pemerintahan, identitas nasional, hak asasi manusia, dan demokrasi merupakan beberapa materi yang juga dibahas dalam Islam sehingga mempunyai potensi untuk dipadukan. Perpaduan ini akan membentuk materi yang mampu memperkuat karakter mahasiswa muslim yang cerdas, moderat, dan toleran dalam menyikapi isu-isu disintegrasi bangsa yang banyak melibatkan unsur SARA.

Pengintegrasian buku ajar pendidikan Kewarganegaraan dengan kajian ke-Islam-an akan memperkaya wawasan mahasiswa akan referensi perkuliahan sekaligus mempermudah mahasiswa untuk memahami posisi kajian syariat Islam dalam ketatanegaraan Indonesia. Hal ini juga bisa menjadi bagian dari upaya PTKI untuk memberantas gerakan-gerakan separatis penentang NKRI dan sekularisme.

4.2. Prototype Bahan Ajar/ Materi Pendidikan

Kewarganegaraan Di PTKI

4.2.1. Aspek Materi

Sebagai salah satu mata kuliah wajib umum (MKWU) di perguruan tinggi sesuai amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi strategis dalam upaya melakukan transmisi pengetahuan dan transformasi sikap dan perilaku mahasiswa. Oleh karena itu, capaian pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan harus terstandarisasi di setiap perguruan tinggi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) pendidikan kewarganegaraan sebagai batas minimal pemahaman yang harus dikuasai mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah pendidikan Kewarganegaraan. Capaian pembelajaran tersebut meliputi:

- a. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan dan cinta tanah air
- b. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung demokrasi berkeadaban
- c. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung kesadaran hukum dan toleransi dalam keberagaman

- d. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung sistem keamanan dan pertahanan rakyat semesta sesuai keilmuan dan profesinya.

Dalam rangka mencapai CPMK mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang terstandar di perguruan tinggi seluruh Indonesia tersebut, maka Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti menindaklanjutinya dengan merumuskan buku ajar pendidikan Kewarganegaraan dan perguruan tinggi dihimbau untuk menjadikannya sebagai salah satu buku rujukan/ pedoman perkuliahan. Adapun materi pendidikan Kewarganegaraan yang termaktub didalamnya meliputi:

- a. Bab I tentang hakikat pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional
- b. Bab II tentang esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter.
- c. Bab III tentang urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Bab IV tentang nilai dan norma konstitusional Undang-undang NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan dibawah UUD
- e. Bab V tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat.

- f. Bab VI tentang hakekat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945.
- g. Bab VII tentang dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan.
- h. Bab VIII tentang dinamika historis dan urgensi wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia.
- i. Bab IX tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan.
- j. Bab X tentang penyelenggaraan *Project Citizen* untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan

Perguruan tinggi keagamaan Islam sebagai salah satu implementasi kekhasan pemerintahan Indonesia dengan adanya kementerian agama juga wajib menyelenggarakan mata kuliah wajib umum (MKWU) termasuk pendidikan Kewarganegaraan. Menilik pada kekhasannya sebagai perguruan tinggi berbasis keagamaan Islam maka dalam perkuliahan pendidikan Kewarganegaraan juga diperlukan buku ajar pendamping yang mencerminkan sinergi materi kewarganegaraan dengan kajian ke-Islam-an selain buku ajar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti. Pada kenyataannya memang beberapa konten materi pendidikan Kewarganegaraan juga selaras, bersinergi bahkan merujuk pada nilai kajian Islam. Hal ini tentu akan membuka wawasan mahasiswa terhadap hubungan kehidupan beragama dan bernegara sehingga mampu memupuk rasa nasionalisme dan

patriotisme serta persatuan yang mendalam. Adapun materi-materi pendidikan Kewarganegaraan yang berpotensi diintegrasikan dengan kajian ke-Islam-an antara lain:

Tabel 4.1. Potensi Integrasi Materi Pendidikan Kewarganegaraan Dengan Kajian Islam

No	Materi Pendidikan Kewarganegaraan	Kajian/ Materi Ke-Islam-an	Keterangan
1	Negara dan Sistem Pemerintahan	Konsep Negara dalam Islam	Walaupun materi ini tidak dibahas dalam buku ajar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti namun esensinya masih diperlukan dalam memahami konsep “NKRI harga mati”
2	Identitas Nasional	-	Dibahas juga dalam buku ajar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti
3	Demokrasi	Demokrasi Dalam Islam	Dibahas juga dalam buku ajar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti
4	Kewarganegaraan beserta hak dan kewajibannya	-	Dibahas juga dalam buku ajar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti

5	Konstitusi dan <i>Rule Of Law</i>	Konstitusi Dalam Pandangan Islam	Dibahas juga dalam buku ajar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti
6	Hak Asasi Manusia	HAM Menurut Pandangan Islam	Walaupun materi ini tidak dibahas dalam buku ajar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti namun esensinya masih diperlukan dalam memahami konsep penegakan HAM
7	Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia	-	Dibahas juga dalam buku ajar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti
8	Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Indonesia	-	Dibahas juga dalam buku ajar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti
9	Integrasi Nasional dan Konflik	-	Dibahas juga dalam buku ajar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti

Untuk merealisasikan sinergi kajian Islam dengan materi pendidikan kewarganegaraan dalam buku ajar maka digunakanlah beberapa referensi antara lain:



Gambar 4.1. Buku-Buku Referensi Yang digunakan

4.2.2. Aspek Bahasa dan Tata Tulis

Bahasa dalam buku ajar pendidikan Kewarganegaraan “*Be Good and Smart Moslem’s*” menggunakan Bahasa Indonesia dengan berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kata atau kalimat bahasa asing tetap ditulis dengan bahasa aslinya dengan dicetak miring (*italic*) dan bila lebih dari 4 baris maka dijadikan 1 spasi. Penulisan menggunakan model huruf *times new roman* dengan ukuran (*font*) 12, spasi yang digunakan adalah 1,5 sedangkan untuk tulisan dalam tabel menggunakan spasi 1. Gaya selingkung rujukan/ referensi secara umum menggunakan *body note*, namun tetap mempertimbangkan *foot note* untuk menjelaskan hal lain yang masih berkaitan dengan bahasan secara terperinci.

4.2.3. Aspek Media dan Grafika

Penelitian pengembangan ini menghasilkan sebuah produk buku ajar dengan judul pendidikan Kewarganegaraan “*Be Good and Smart Moslem’s*”. Oleh karena itu aspek media dan grafika merupakan bagian yang perlu di rancang sebagai bagian dari prototype produk yang dihasilkan. Aspek media dan grafika dibuat sedemikian rupa dengan design secara abstrak sehingga mewakili pluralitas materi yang disajikan. Berikut disajikan prototype cover buku ajar pendidikan Kewarganegaraan “*Be Good and Smart Moslem’s*”:



Gambar 4.2. Prototype Cover Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan “*Be Good and Smart Moslem’s*”

Dalam psikologi warna, warna dominan putih pada cover menunjukkan tujuan yang suci dari perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu mewujudkan generasi penerus bangsa yang baik dan cerdas (*Good and Smart Citizen’s*). Warna orange menunjukkan kenyamanan hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara dengan sikap yang toleran walaupun beraneka ragam suku, agama dan ras. Warna hijau toska menunjukkan keceriaan dengan harapan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan akan berjalan dengan aktif efektif dan menyenangkan.

Kalimat *be good and smart moslem’s*, merupakan modifikasi dari tujuan pendidikan kewarganegaraan pada umumnya yaitu *good and smart citizen’s*, karena buku ini digunakan sebagai pedoman perkuliahan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi keagamaan Islam. Sama halnya dengan kalimat *Hubbul wathon Minal Iman* menunjukkan bahwa antara kajian agama dan negara memiliki sinergi yang kuat untuk membentuk semangat nasionalisme dan patriotisme warga negara. Paragraf di cover

belakang mendeskripsikan urgensi mata kuliah di perguruan tinggi keagamaan Islam serta tujuan penyelenggaraannya sehingga memotivasi penulis untuk membuat buku ajar ini. Kalimat "*bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*" menunjukkan semboyan bangsa sebagai modal persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang berbeda suku, agama dan ras.

Background wilayah Indonesia di cover depan dan belakang merupakan cerminan wilayah teritorial negara kesatuan republik Indonesia yang wajib dipertahankan dengan segenap daya dan upaya termasuk melalui penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Kewarganegaraan. Gambar Masjid Menara Kudus dan kenduri mecermikan akulturasi antara agama Islam dengan budaya masyarakat sebelumnya, ini menunjukkan bahwa Islam adalah adama yang *rahmatan lil alamin*. Gambar santri yang melaksanakan upacara bendera mewakili umat Islam yang menjunjung tinggi rasa nasionalisme dan patriotisme.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Hasil Penilaian Dan Saran Perbaikan Prototype Bahan

Ajar/ Materi Pendidikan Kewarganegaraan Di PTKI

4.3.1.1. Penilaian Dan Perbaikan Ahli Isi dan Sajian

Materi

Pada aspek kelayakan isi, diperoleh skor 75 dari 7 item pertanyaan dari 3 ahli. Berdasarkan perolehan tersebut maka pakar/ ahli menilai kelayakan isi dan sajian materi rata-rata 3,57 atau 89%. Aspek materi pendukung/ rujukan memperoleh skor 11 dari 3 item pertanyaan, berdasarkan perolehan tersebut pakar atau ahli menilai kelayakannya rata-rata 3,67 atau 91 %. Aspek kelayakan penyajian memperoleh skor 8 dari 2 item pertanyaan,

berdasarkan perolehan tersebut pakar atau ahli menilai kelayakannya rata-rata 4 atau 100 %. Sehingga disimpulkan buku ajar layak digunakan dengan revisi perbaikan.

Berdasarkan penilaian dan perbaikan dari ahli materi yang dilakukan oleh ketua program studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yaitu bapak Hermi Yanzi, M.Pd selaku ahli/pakar Kewarganegaraan maka beberapa hal yang menjadi titik perhatian adalah:

- A. Pada BAB 1, pembahasan wilayah sebagai salah satu unsur negara perlu dijelaskan lebih rinci tentang peranannya dalam konsepsi negara yang berdaulat. Wilayah merupakan teritorial sebuah negara dimana akan mencerminkan kemampuan negara dalam menjaga dan mempertahankannya, termasuk mengeksplorasi kekayaan sumberdaya alamnya dan pluralitas masyarakat yang mendiaminya.
- B. Pada BAB 1, sub bab “sistem pemerintahan di Indonesia” diperlukan penegasan yang dilakukan penulis tentang pendapat Asshiddiqie yang menyatakan pergeseran sistem pemerintahan di Indonesia dari *Quasi Presidensial* menjadi *Presidensial*. Penegasan tersebut bisa juga dengan memberikan contoh perbandingan hubungan legislatif-eksekutif ketika rezim orde baru dengan saat era reformasi saat ini.
- C. Pada BAB 1, sub bab “elemen kekuatan negara” perlu di kemukakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan perlu diberikan deskripsi tentang kekurangan-kekurangan yang dimiliki, sehingga pembaca akan lebih mudah

- menganalisa. Hal ini akan memberikan kesadaran pada para pembaca tentang kondisi kekinian bangsa Indonesia.
- D. Pada BAB 1, sub bab “konsep negara dalam Islam” perlu diberikan pengkajian tentang penguatan Pancasila sebagai ideologi, pandangan/pedoman, dan dasar negara yang bersifat final. Indonesia bukanlah negara agama namun menghargai keberadaan dan toleransi keberagaman sebagai bagian sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang tidak terpisahkan. Indonesia juga bukan negara sekuler yang memisahkan urusan agama dan pemerintahan.
- E. Pada BAB 2, sub bab “unsur-unsur identitas nasional” perlu ditambahkan pendapat penulis tentang peranan unsur-unsur tersebut dalam mencerminkan kekhasan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Pendeskripsiannya bisa juga dengan memberikan contoh pada setiap unsur.
- F. Pada BAB 3, sub bab “manfaat demokrasi” perlu ditambahkan pendapat penulis tentang deskripsi setiap item yang disebutkan. Memberikan contoh realitas dalam setiap butir manfaat yang disebutkan menjadi hal yang menarik dan memudahkan pembaca untuk memahaminya.
- G. Pada BAB 3, sub bab “kriteria, nilai dan prinsip demokrasi” perlu diberikan penjelasan peneliti tentang keterkaitan pendapat Rauf dan Tjhin sehingga memunculkan integrasi pendapat ahli yang selaras sehingga akan memudahkan pembaca untuk menganalisa.
- H. Pada BAB 3, sub bab “perjalanan demokrasi di Indonesia” perlu dideskripsikan contoh riil kegiatan demokrasi

zaman Sriwijaya dan Majapahit. Sedangkan demokrasi asli dari berbagai daerah di Indonesia perlu dijelaskan kearifan lokal apa yang dimaksud.

- I. Pada BAB 3, sub bab “pendidikan demokrasi” tidak cocok untuk mencontohkan pendidikan demokrasi disekolah, lebih tepat pendidikan demokrasi di perguruan tinggi sesuai dengan subjek/ pangsas pasar Bahan Ajar/ Materi tersebut.
- J. Pada BAB 8, sub bab ‘Asta Gatra’ perlu di kelompokkan mana yang termasuk bagian dari Tri Gatra dan Panca Gatra.
- K. Pada BAB 8, sub bab “gatra sumber daya alam” perlu penjelasan peranannya dalam mewujudkan ketahanan nasional
- L. Pada BAB 8, sub bab “sumber daya manusia” perlu penjelasan peranannya dalam mewujudkan ketahanan nasional
- M. Pada BAB 8, sub bab “gatra idiologi” perlu penjelasan peneliti bahwa idiologi Pancasila bersifat terbuka sehingga mampu berinteraksi atau bahkan mengadopsi aspek positif dari idiologi lain (liberal, komunis, dan agama) untuk mencapai tujuan negara.
- N. Pada BAB 8, sub bab “gatra politik” perlu penjelasan peranannya dalam mewujudkan ketahanan nasional
- O. Pada BAB 8, sub bab “gatra ekonomi” perlu penjelasan peranannya dalam mewujudkan ketahanan nasional
- P. Pada BAB 8, sub bab “sosial budaya” perlu penjelasan peranannya dalam mewujudkan ketahanan nasional

Q. Pada BAB 8, sub bab “pertahanan dan keamanan” perlu penjelasan peranannya dalam mewujudkan ketahanan nasional. Bida juga dikaitkan dengan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) kekinian yang dihadapi Indonesia.

Berdasarkan penilaian dan perbaikan dari ahli materi yang dilakukan oleh ahli/ pakar kajian budaya yaitu ibu Deri Ciciria, M.Hum maka beberapa hal yang menjadi titik perhatian adalah:

- A. Pada BAB 2, sub bab “unsur-unsur identitas nasional” perlu di deskripsikan identitas kedaerahan yang menjadi bagian dari identitas nasional bangsa Indonesia. Relasi antara agama Islam dan budaya di Indonesia juga perlu ditekankan sebagai pemahaman Islam yang *Rahmatan Lil Alamin*.
- B. Pada BAB 3, sub bab “perjalanan demokrasi di Indonesia” perlu dijelaskan bahwa kearifan lokal yang dimiliki suku bangsa di Indonesia juga memiliki kriteria, nilai dan prinsip demokrasi yang di cita-citakan bangsa Indonesia.
- C. Pada BAB 9, sub bab “Kearifan Lokal Sebagai Strategi Integrasi Nasional” seharusnya tidak hanya menonjolkan *piil pesenggiri* sebagai kearifan lokal suku Lampung. Bisa saja ditambahkan kearifan lokal *pitutur* dari suku Jawa, *Tri Tangtu* dari suku Sunda, dan *Trihita Karana* dari suku Bali.

Berdasarkan penilaian dan perbaikan dari ahli materi yang dilakukan oleh ahli/ pakar Tafsir Hadist yaitu ibu Sri Handayana, M.Hum maka beberapa hal yang menjadi titik perhatian adalah:

- A. Rujukan dari Al Qur’an dan Hadist, akan lebih baik jika dibahasakan arab sesuai dengan teks aslinya.

- B. Pada BAB 1, sub bab “konsep negara dalam Islam” perlu peninjauan normatif dan historis tentang konsep negara Islam dan perbedaannya dengan Pancasila.
- C. Pada BAB 1, sub bab “Relasi Agama dan Negara”, perlu dijelaskan paradigma integralistik, sekuler, dan simbiotik.
- D. Pada BAB 1, sub bab “Relasi Agama dan Negara”, perlu di jewantahkan bahwa Islam di Indonesia berbeda dengan di negara-negara Khilafah karena memiliki sejarah perjuangan dan sosial kemasyarakatan yang berbeda.
- E. Pada BAB 1-9, perlu secara merata di integrasikan dengan kajian ke-Islam-an sebagai ciri khas dari Bahan Ajar/ Materi ini dengan Bahan Ajar/ Materi sejenis.

4.3.1.2. Penilaian Dan Perbaikan Ahli Kebahasaan

Pada aspek kesesuaian pemakaian bahasa yang komunikatif, diperoleh skor 7 dari 2 item pertanyaan. Berdasarkan perolehan tersebut maka pakar/ ahli kebahasaan menilai kelugasan, ketepatan, dan kebakuan bahasa rata-rata 3 atau 75%. Aspek kesesuaian pemakaian bahasa yang komunikatif memperoleh skor 11 dari 3 item pertanyaan, berdasarkan perolehan tersebut pakar atau ahli menilai kelayakannya rata-rata 3,5 atau 87,5 %. Sehingga disimpulkan buku ajar layak digunakan dengan revisi perbaikan bahasa.

Berdasarkan penilaian dan perbaikan dari ahli materi yang dilakukan oleh ahli/ pakar bahasa yaitu ibu Dr. (C) Andri Wicaksono, M.Pd maka beberapa hal yang menjadi titik perhatian adalah:

- A. Beberapa struktur kalimat yang ditandai perlu disederhanakan karena terkesan banyak kata yang mubazir. Kalimat yang sederhana akan mudah memudahkan pembaca untuk memahami makna informasi yang dikandungnya. Banyak kalimat yang bersifat kompleks yang seharusnya dapat di simplekskan
- B. Memadatkan struktur kalimat juga dapat dilakukan dengan nominalisasi bahasa di tingkat lexis, sehingga proses (verba), kondisi (adjektiva), sirkumstansi (adverbia), dan logika (konjungsi) akan nampak jelas.
- C. Kata-kata yang digunakan harus lebih banyak mengandung kata leksial (nomina, verba-predikator, adjektiva, dan adverbia) dari pada kata-kata struktural (konjungsi, kata sandang, preposisi dan lain sebagainya).
- D. Penggunaan struktur kalimat perlu memanfaatkan metafora gramatika dan bahasa secara teknis.
- E. Dalam menjabarkan materi perlu mempertimbangkan keruntutan/ tahapan berpikir mahasiswa. Sehingga kalimat harus bersifat teknis.
- F. Pengacuan esfora perlu digunakan untuk menyederhanakan kalimat agar *to the point* terhadap makna yang dituju dan lebih ilmiah.
- G. Pendeskripsian pengertian, sifat, nilai, ciri-ciri, dan keadaan harus memperhatikan proses relasional identifikatif dan relasional atributif.
- H. Bahan Ajar/ Materi harus bersifat monologis dengan mendayagunakan kalimat indikatif-deklaratif.
- I. Bahan Ajar/ Materi tidak boleh mengandung kalimat minor

4.3.1.3. Penilaian Dan Perbaikan Ahli Desain Grafis/ Media

Pada aspek kelayakan desain/ bentuk buku, diperoleh skor 11 dari 3 item pertanyaan. Berdasarkan perolehan tersebut maka pakar/ ahli Desain Grafis menilai kelayakan desain/ bentuk buku rata-rata 3,67 atau 91,75%. Aspek kelayakan sampul/ cover memperoleh skor 18 dari 5 item pertanyaan, berdasarkan perolehan tersebut pakar atau ahli desain grafis menilai kelayakannya rata-rata 3,6 atau 90%. Aspek kelayakan desain isi buku memperoleh skor 18 dari 5 item pertanyaan, berdasarkan perolehan tersebut pakar atau ahli desain grafis menilai kelayakannya rata-rata 3,6 atau 90%. Sehingga disimpulkan buku ajar layak digunakan dengan revisi perbaikan design grafis.

Berdasarkan penilaian dan perbaikan dari ahli materi yang dilakukan oleh ahli/ pakar desain grafis yaitu ibu Muhammad Afif Zuhad maka beberapa hal yang menjadi titik perhatian adalah:

- A. Desain dan bentuk buku harus mengikuti ukuran kewajaran, biasanya hal ini ditentukan oleh penerbit atau lembaga tertentu yang memiliki kepentingan terhadap karya ilmiah yang dibuat.
- B. Kualitas kertas harus standart sesuai dengan ketentuan penerbit/ percetakan. Tinta juga demikian, setidaknya merupakan kualitas cetak *canon digital image runner* bukan kualitas fotocopy.
- C. Pada cover, tulisan harus pemilihan huruf harus menarik namun tetap mudah dibaca. Pada bagian cover depan harus padat kalimat yang menunjukkan identitas buku, sedangkan penjabarannya bisa di cover belakang.

Ketepatan pemilihan dan penempatan gambar/ ilustrasi yang mewakili tema buku ajar harus menarik strategis.

- D. Pada bagian isi, ukuran dan jenis huruf serta spasi yang digunakan harus terstandart sesuai ketentuan penerbitan. Tabel, gambar dan grafik harus mewakili makna dari sebuah tema yang dijelaskan serta penempatannya harus strategis sehingga menarik pembaca. Penomoran halaman harus sesuai dengan daftar isi, ketebalan buku ajar harus ideal jangan membuat pembaca menjadi *down* sebelum membacanya

4.3.1.4. Penilaian Dan Perbaikan Dari Pengguna/ Mahasiswa

Pada aspek ketertarikan materi, diperoleh skor 15 dari 4 item pertanyaan per 30 mahasiswa. Berdasarkan perolehan tersebut maka mahasiswa menilai ketertarikan materi rata-rata 3,75 atau 93,75%. Aspek tingkat kesulitan materi memperoleh skor 10 dari 3 item pertanyaan, berdasarkan perolehan tersebut mahasiswa menilai kelayakannya rata-rata 3,33 atau 83,33%. Aspek kebermanfaatan memperoleh skor 8 dari 2 item pertanyaan, berdasarkan perolehan tersebut mahasiswa menilai kelayakannya rata-rata 4 atau 100%. Aspek bahasa memperoleh skor 8 dari 2 item pertanyaan, berdasarkan perolehan tersebut mahasiswa menilai kelayakannya rata-rata 4 atau 100%. Sehingga disimpulkan buku ajar layak digunakan dengan revisi.

Berdasarkan penilaian dari mahasiswa yang dilakukan oleh mahasiswa PGMI dan PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan maka beberapa hal yang menjadi titik perhatian adalah:

- A. Kajian ke-Islam-an terhadap materi pendidikan kewarganegaraan belum merata disetiap bab. Serta keterkaitan materi yang satu dengan lainnya belum muncul secara erat.
- B. Secara keseluruhan materi sudah runtut dan sistematis sesuai taxonomy/ tahapan berpikir mahasiswa, namun keterkaitan antar bab belum nampak. Penggunaan istilah-istilah harus dijelaskan deskripsinya, bila perlu munculkan glosarium untuk menjelaskannya.
- C. Pemahaman materi perlu di relevansikan dengan kondisi/ realitas idiologi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan serta kondisi keagamaan masyarakat Indonesia.

4.3.2. Bahan Ajar/ Materi Pendidikan Kewarganegaraan Di PTKI Pasca Perbaikan

4.3.2.1. Aspek Materi

Berdasarkan penilaian ahli/ pakar sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Hermi Yanzi, M.Pd, ahli/ pakar Kajian Budaya yaitu Deri Ciciria, M.Hum, dan ahli/ pakar Tafsir Hadist yaitu Sri Handayana, M.Hum maka diperoleh kesimpulan bahwa Bahan Ajar/ Materi Pendidikan Kewarganegaraan di PTKIN ini layak untuk digunakan dan diterbitkan dengan beberapa catatan perbaikan. Adapun rekapitulasi catatan perbaikan tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.2. Rekapitulasi perbaikan ahli/ pakar materi Pendidikan Kewarganegaraan

No	Ahli/ Pakar	Catatan Perbaikan	Persetujuan Penulis		Jika Tidak Apa Alasannya
			Setuju	Tidak	
1	Hermi Yanzi, M.Pd	A. Pada BAB 1, pembahasan wilayah sebagai salah satu unsur negara perlu dijelaskan lebih rinci tentang peranannya dalam konsepsi negara yang berdaulat. Wilayah merupakan teritorial sebuah negara dimana akan mencerminkan kemampuan negara dalam menjaga dan mempertahankannya, termasuk mengeksplorasi kekayaan sumberdaya alamnya dan pluralitas masyarakat yang mendiaminya.	√	-	-
		B. Pada BAB 1, sub bab “sistem pemerintahan di Indonesia” diperlukan penegasan yang dilakukan penulis tentang pendapat Asshiddiqie yang	√	-	-

	<p>menyatakan pergeseran sistem pemerintahan di Indonesia dari <i>Quasi Presidensial</i> menjadi <i>Presidensial</i>. Penegasan tersebut bisa juga dengan memberikan contoh perbandingan hubungan legislatif-eksekutif ketika rezim orde baru dengan saat era reformasi saat ini.</p>			
	<p>C. Pada BAB 1, sub bab “elemen kekuatan negara” perlu di kemukakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan perlu diberikan deskripsi tentang kekurangan-kekurangan yang dimiliki, sehingga pembaca akan lebih mudah menganalisa. Hal ini akan memberikan kesadaran pada para pembaca tentang kondisi kekinian bangsa Indonesia.</p>	√	-	-

	<p>D. Pada BAB 1, sub bab “konsep negara dalam Islam” perlu diberikan pengkajian tentang penguatan Pancasila sebagai idiologi, pandangan/pedoman, dan dasar negara yang bersifat final. Indonesia bukanlah negara agama namun menghargai keberadaan dan toleransi keberagaman sebagai bagian sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang tidak terpisahkan. Indonesia juga bukan negara sekuler yang memisahkan urusan agama dan pemerintahan.</p>	√	-	-
	<p>E. Pada BAB 2, sub bab “unsur-unsur identitas nasional” perlu ditambahkan pendapat penulis tentang peranan unsur-unsur tersebut dalam mencerminkan kekhasan Indonesia sebagai sebuah bangsa.</p>	√	-	-

	<p>Pendeskripsianya bisa juga dengan memberikan contoh pada setiap unsur.</p>			
	<p>F. Pada BAB 3, sub bab “manfaat demokrasi” perlu ditambahkan pendapat penulis tentang deskripsi setiap item yang disebutkan. Memberikan contoh realitas dalam setiap butir manfaat yang disebutkan menjadi hal yang menarik dan memudahkan pembaca untuk memahaminya.</p>	√	-	-
	<p>G. Pada BAB 3, sub bab “kriteria, nilai dan prinsip demokrasi” perlu diberikan penjelasan peneliti tentang keterkaitan pendapat Rauf dan Tjhin sehingga memunculkan integrasi pendapat ahli yang selaras sehingga akan memudahkan pembaca untuk menganalisa.</p>	√	-	-

	H. Pada BAB 3, sub bab “perjalanan demokrasi di Indonesia” perlu dideskripsikan contoh riil kegiatan demokrasi zaman Sriwijaya dan Majapahit. Sedangkan demokrasi asli dari berbagai daerah di Indonesia perlu dijelaskan kearifan lokal apa yang dimaksud.	√	-	-
	I. Pada BAB 3, sub bab “pendidikan demokrasi” tidak cocok untuk mencontohkan pendidikan demokrasi disekolah, lebih tepat pendidikan demokrasi di perguruan tinggi sesuai dengan subjek/ pangsa pasar Bahan Ajar/ Materi tersebut.	√	-	-
	J. Pada BAB 8, sub bab ‘Asta Gatra” perlu di kelompokkan mana yang termasuk bagian dari Tri Gatra dan Panca Gatra.	√	-	-

	K. Pada BAB 8, sub bab “gatra sumber daya alam” perlu penjelasan peranannya dalam mewujudkan ketahanan nasional	√	-	-
	L. Pada BAB 8, sub bab “sumber daya manusia” perlu penjelasan peranannya dalam mewujudkan ketahanan nasional	√	-	-
	M. Pada BAB 8, sub bab “gatra idiologi” perlu penjelasan peneliti bahwa idiologi Pancasila bersifat terbuka sehingga mampu berinteraksi atau bahkan mengadopsi aspek positif dari idiologi lain (liberal, komunis, dan agama) untuk mencapai tujuan negara.	√	-	-
	N. Pada BAB 8, sub bab “gatra politik” perlu penjelasan peranannya dalam mewujudkan ketahanan nasional	√	-	-

		O. Pada BAB 8, sub bab “gatra ekonomi” perlu penjelasan peranannya dalam mewujudkan ketahanan nasional	√	-	-
		P. Pada BAB 8, sub bab “sosial budaya” perlu penjelasan peranannya dalam mewujudkan ketahanan nasional	√	-	-
		Q. Pada BAB 8, sub bab “pertahanan dan keamanan” perlu penjelasan peranannya dalam mewujudkan ketahanan nasional. Bida juga dikaitkan dengan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) kekinian yang dihadapi Indonesia.	√	-	-
2	Deri Ciciria, M.Hum	A. Pada BAB 2, sub bab “unsur-unsur identitas nasional” perlu di deskripsikan identitas kedaerahan yang menjadi bagian dari identitas nasional bangsa Indonesia. Relasi antara agama Islam dan	√	-	-

	<p>budaya di Indonesia juga perlu ditekankan sebagai pemahaman Islam yang <i>Rahmatan Lil Alamin</i>.</p>			
	<p>B. Pada BAB 3, sub bab “perjalanan demokrasi di Indonesia” perlu dijelaskan bahwa kearifan lokal yang dimiliki suku bangsa di Indonesia juga memiliki kriteria, nilai dan prinsip demokrasi yang di cita-citakan bangsa Indonesia.</p>	√	-	-
	<p>C. Pada BAB 9, sub bab “Kearifan Lokal Sebagai Strategi Integrasi Nasional” seharusnya tidak hanya menonjolkan <i>pil pesenggiri</i> sebagai kearifan lokal suku Lampung. Bisa saja ditambahkan kearifan lokal <i>pitutur</i> dari suku Jawa, Tri Tangtu dari suku Sunda, dan <i>Trihita Karana</i> dari suku Bali.</p>	√	-	-

3	Sri Handayana, H.Hum	A. Rujukan dari Al Qur'an dan Hadist, akan lebih baik jika dibahasakan arab sesuai dengan teks aslinya.	√	-	-
		B. Pada BAB 1, sub bab "konsep negara dalam Islam" perlu peninjauan normatif dan historis tentang konsep negara Islam dan perbedaannya dengan Pancasila.	√	-	-
		C. Pada BAB 1, sub bab "Relasi Agama dan Negara", perlu dijelaskan paradigma integralistik, sekuler, dan simbiotik.	√	-	-
		D. Pada BAB 1, sub bab "Relasi Agama dan Negara", perlu di jewantahkan bahwa Islam di Indonesia berbeda dengan di negara-negara Khilafah karena memiliki sejarah perjuangan dan sosial kemasyarakatan yang berbeda.	√	-	-

		E. Pada BAB 1-9, perlu secara merata diintegrasikan dengan kajian ke-Islam-an sebagai ciri khas dari Bahan Ajar/ Materi ini dengan Bahan Ajar/ Materi sejenis.	-	√	Keterbatasan sumber rujukan dan waktu penelitian sehingga materi identitas nasional, kewarganegaraan berserta hak dan kewajibannya, Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia, Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Indonesia, dan Integrasi Nasional dan Konflik
--	--	--	---	---	--

					tidak di integrasika n dengan nilai-nilai syariat Islam.
--	--	--	--	--	---

Berdasarkan saran perbaikan ahli/ pakar materi tersebut maka konsep materi final dalam Bahan Ajar/ Materi Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Materi Final Bahan Ajar/ Materi Pendidikan Kewarganegaraan

No	Materi/ Bab Dalam Bahan Ajar/ Materi Pendidikan Kewarganegaraan	Terintegrasi dengan Nilai Ke-Islam-an		Jika Ya, Apa Materinya
		Ya	Tidak	
1	Negara dan Sistem Pemerintahan	√	-	Konsep Negara dalam Islam
2	Identitas Nasional	-	√	-
3	Demokrasi	√	-	Demokrasi Dalam Islam
4	Kewarganegaraan beserta hak dan kewajibannya	-	√	-
5	Konstitusi dan <i>Rule Of Law</i>	√	-	Konstitusi Dalam Pandangan Islam
6	Hak Asasi Manusia	√	-	HAM Menurut Pandangan Islam
7	Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia	-	√	-
8	Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Indonesia	-	√	-
9	Integrasi Nasional dan Konflik	-	√	-

4.3.2.2. Aspek Bahasa dan Tata Tulis

Berdasarkan penilaian ahli/ pakar bahasa Indonesia Dr (C) Andri Wicaksono, M.Pd sekaligus maka diperoleh kesimpulan

bahwa Bahan Ajar/ Materi Pendidikan Kewarganegaraan di PTKIN ini layak untuk digunakan dan diterbitkan dengan beberapa catatan perbaikan. Adapun rekapitulasi catatan perbaikan tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.4. Rekapitulasi perbaikan ahli/ pakar Kebahasaan

No	Ahli/ Pakar	Catatan Perbaikan	Persetujuan Penulis		Jika Tidak Apa Alasannya
			Setuju	Tidak	
1	Dr (C) Andri Wicaksono , M.Pd	A. Beberapa struktur kalimat yang ditandai perlu disederhanakan karena terkesan banyak kata yang mubazir. Kalimat yang sederhana akan mudah memudahkan pembaca untuk memahami makna infirmasi yang dikandungnya. Banyak kalimat yang bersifat kompleks yang seharusnya dapat di simplekskan	√	-	-
		B. Memadatkan struktur kalimat juga dapat	√	-	-

		dilakukan dengan nominalisasi bahasa di tingkat lexis, sehingga proses (verba), kondisi (adjektiva), sirkumstansi (adverbia), dan logika (konjungsi) akan nampak jelas.			
		C. Kata-kata yang digunakan harus lebih banyak mengandung kata leksial (nomina, verba-predikator, adjektiva, dan adverbia) dari pada kata-kata struktural (konjungsi, kata sandang, preposisi dan lain sebagainya).	√	-	-
		D. Penggunaan struktur kalimat perlu memanfaatkan metafora gramatika dan bahasa secara teknis.	√	-	-

		E. Dalam menjabarkan materi perlu mempertimbangkan keruntutan/ tahapan berpikir mahasiswa. Sehingga kalimat harus bersifat teknis.	√	-	-
		F. Pengacuan esfora perlu digunakan untuk menyederhanakan kalimat agar <i>to the point</i> terhadap makna yang dituju dan lebih ilmiah.	√	-	-
		G. Pendeskripsian pengertian, sifat, nilai, ciri-ciri, dan keadaan harus memperhatikan proses relasional identifikatif dan relasional atributif.	√	-	-
		H. Bahan Ajar/ Materi harus bersifat monologis dengan mendayagunakan kalimat indikatif-	√	-	-

		deklaratif.			
		I. Bahan Ajar/ Materi tidak boleh mengandung kalimat minor	√	-	-

4.3.2.3. Aspek Design Grafis

Berdasarkan penilaian ahli/ pakar Design Grafis yaitu M. Afif Zuhad maka diperoleh kesimpulan bahwa Bahan Ajar/ Materi Pendidikan Kewarganegaraan di PTKIN ini layak untuk digunakan dan diterbitkan dengan beberapa catatan perbaikan. Adapun rekapitulasi catatan perbaikan design grafis tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Rekapitulasi perbaikan ahli/ pakar Design Grafis

No	Ahli/ Pakar	Catatan Perbaikan	Persetujuan Penulis		Jika Tidak Apa Alasannya
			Setuju	Tidak	
1	M. Afif Zuhad	A. Desain dan bentuk buku harus mengikuti ukuran kewajaran, biasanya hal ini ditentukan oleh penerbit atau lembaga tertentu yang memiliki kepentingan terhadap karya ilmiah yang dibuat.	√	-	-
		B. Kualitas kertas harus standart sesuai dengan ketentuan penerbit/ percetakan. Tinta juga demikian,	√	-	-

	<p>setidaknya merupakan kualitas cetak <i>canon digital image runner</i> bukan kualitas fotocopy.</p>			
	<p>C. Pada cover, tulisan harus pemilihan huruf harus menarik namun tetap mudah dibaca. Pada bagian cover depan harus padat kalimat yang menunjukkan identitas buku, sedangkan penjabarannya bisa di cover belakang. Ketepatan pemilihan dan penempatan gambar/ ilustrasi yang mewakili tema buku ajar harus menarik strategis.</p>	√	-	-
	<p>D. Pada bagian isi, ukuran dan jenis huruf serta spasi yang digunakan</p>	√	-	-

		<p>harus terstandart sesuai ketentuan penerbitan. Tabel, gambar dan grafik harus mewakili makna dari sebuah tema yang dijelaskan serta penempatannya harus strategis sehingga menarik pembaca. Penomoran halaman harus sesuai dengan daftar isi, ketebalan buku ajar harus ideal jangan membuat pembaca menjadi <i>down</i> sebelum membacanya</p>			
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan penilaian dan catatan perbaikan ahli/ pakar design grafis tersebut, maka diperoleh draft final cover dan belakang sebagai berikut



Gambar 4.3. Draft Final Cover Depan dan Belakang Bahan Ajar/ Materi Pendidikan Kewarganegaraan “Be Good and Smart Moslem’s”

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Pengembangan Bahan Ajar/ Materi Pendidikan Kewarganegaraan di PTKIN dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai syariat Islam sehingga dapat menunjang perkuliahannya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang khas dengan ke-Islaman-nya. Adapun materi-materi yang dapat terintegrasi antara lain Negara dan Sistem Pemerintahan, Demokrasi, Konstitusi dan *Rule Of Law*, serta Hak Asasi Manusia.
- B. Bahan Ajar/ Materi dengan judul “Pendidikan Kewarganegaraan *Be Good and Smart Moslem*” layak digunakan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan beberapa perbaikan. Adapun prosentase/ Skoring Kelayakannya adalah sebagai berikut: Pada aspek materi, kelayakan isi memperoleh skor 75 dari 7 item pertanyaan dari 3 ahli. Berdasarkan perolehan tersebut maka pakar/ ahli menilai kelayakan isi dan sajian materi rata-rata 3,57 atau 89%. materi pendukung/ rujukan memperoleh skor 11 dari 3 item pertanyaan, berdasarkan perolehan tersebut pakar atau ahli menilai kelayakannya rata-rata 3,67 atau 91 %. kelayakan penyajian memperoleh skor 8 dari 2 item pertanyaan, berdasarkan perolehan tersebut pakar atau ahli menilai kelayakannya rata-rata 4 atau 100

%. Sehingga disimpulkan buku ajar layak digunakan dengan revisi perbaikan.

Pada aspek kebahasaan, kesesuaian pemakaian bahasa yang komunikatif memperoleh skor 7 dari 2 item pertanyaan. Berdasarkan perolehan tersebut maka pakar/ ahli kebahasaan menilai kelugasan, ketepatan, dan kebakuan bahasa rata-rata 3 atau 75%. Kesesuaian pemakaian bahasa yang komunikatif memperoleh skor 11 dari 3 item pertanyaan, berdasarkan perolehan tersebut pakar atau ahli menilai kelayakannya rata-rata 3,5 atau 87,5 %. Sehingga disimpulkan buku ajar layak digunakan dengan revisi perbaikan bahasa.

Pada aspek design grafis, kelayakan desain/ bentuk buku memperoleh skor 11 dari 3 item pertanyaan. Berdasarkan perolehan tersebut maka pakar/ ahli Desain Grafis menilai kelayakan desain/ bentuk buku rata-rata 3,67 atau 91,75%. kelayakan sampul/ cover memperoleh skor 18 dari 5 item pertanyaan, berdasarkan perolehan tersebut pakar atau ahli desain grafis menilai kelayakannya rata-rata 3,6 atau 90%. kelayakan desain isi buku memperoleh skor 18 dari 5 item pertanyaan, berdasarkan perolehan tersebut pakar atau ahli desain grafis menilai kelayakannya rata-rata 3,6 atau 90%.

Pada aspek penilaian mahasiswa, ketertarikan materi memperoleh skor 15 dari 4 item pertanyaan per 30 mahasiswa. Berdasarkan perolehan tersebut maka mahasiswa menilai ketertarikan materi rata-rata 3,75 atau 93,75%. tingkat kesulitan materi memperoleh skor 10 dari 3 item pertanyaan, berdasarkan perolehan

tersebut mahasiswa menilai kelayakannya rata-rata 3,33 atau 83,33%. kebermanfaatan memperoleh skor 8 dari 2 item pertanyaan, berdasarkan perolehan tersebut mahasiswa menilai kelayakannya rata-rata 4 atau 100%. Bahasa memperoleh skor 8 dari 2 item pertanyaan, berdasarkan perolehan tersebut mahasiswa menilai kelayakannya rata-rata 4 atau 100%. Sehingga disimpulkan buku ajar layak digunakan dengan revisi.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian tersebut, maka saran-saran yang diberikan peneliti antara lain:

- A. Bagi lembaga dalam hal ini Program Studi/ Jurusan Tadris IPS FTIK IAIN Metro adalah buku ajar sebagai produk dalam penelitian ini mampu menunjang pembelajaran mahasiswa dalam rangka mencapai visi dan misi lembaga dalam mewujudkan integrasi nilai-nilai ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an. Sehingga Bahan Ajar/ Materi ini mampu mengangkat elektabilitas mutu dalam borang akreditasi program studi Tadris IPS.
- B. Bagi dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, Bahan Ajar/ Materi ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan yang bersifat khas pada perkuliahan Kewarganegaraan.
- C. Bagi peneliti lain, masih terdapat peluang untuk mengembangkan Bahan Ajar/ Materi ini khususnya pada materi-materi yang belum memunculkan integrasi nilai-nilai ke-Islam-an.

D. Bagi mahasiswa, buku ajar yang dihasilkan dalam penelitian ini mampu menambah wawasan/ pemahaman tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia yang memiliki kekhasan dengan bangsa lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kemenristekdikti nomor 435/B/SE/2016 tentang himbauan
penggunaan bahan Bahan Ajar/ Materi mata kuliah wajib
<http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=2946>
<http://www.mediaindonesia.com/news/read/122587/kualitas-sdm-indonesia-meningkat/2017-09-15>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2012. *Bahan Modul Kuliah Kewarganegaraan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- Kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi. 2017. *Panduan Bimbingan Teknis Dosen MKU Kewarganegaraan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Sumberdaya IPTEK dan Pendidikan Tinggi.
- Kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, cetakan I*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Kerr, D. 1999. *Citizenship Education: an International Comparison*. England: NFER
- Lestari, Ika. 2013. *Pengembangan Bahan Ajar/ Materi Berbasis Kompetensi*. Padang: Akademia.
- Muslich, Masnur. 2010. *Text Book Writing*. Jogjakarta: Ar-ruz Media.
- Peraturan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
- Prastowo, Andi. 2011. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar/ Materi Inovatif*. Jogjakarta: Diva Press.

- _____. 2013. *pengembangan Bahan Ajar/ Materi Tematik – Panduan Lengkap Aplikatif*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Richards, 2001. *Curriculum Development in Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Winataputra, US. 2001. *Jati diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi, (Disertasi)*. Bandung: UPI

PENGEMBANGAN MATERI

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM



Penulis bernama Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, M.Pd, menyelesaikan S-1 pada program studi PPKn FKIP Universitas Lampung pada tahun 2010, S-2 pada program studi Pendidikan IPS PPs FKIP Universitas Lampung pada tahun 2012. Karya ilmiah yang pernah dihasilkan penulis antara lain: "Pola Integrasi Pada Masyarakat Majemuk" (Jurnal JIPSINDO, 2016).

"Pili Pesenggiri: Strategi Resolusi Konflik Menggunakan Nilai-nilai Agama dan Pancasila" (Jurnal Masyarakat dan Budaya LIPI, 2017). Kegiatan pengabdian yang pernah dilakukan antara lain juri LCC UUD 1945 dan TAP MPR RI Lampung Tengah (2015-2016), juri olimpiade PPKn se-Provinsi Lampung (2016-2017), pemateri Bela Negara pada Program studi PPKn Unila dan UKK Menwa Batalyon 205 Gagak Wulung Metro (2016-2017). Penulis meniti karir sebagai Guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung (2010-2012), menjadi dosen luar biasa MKU Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di berbagai perguruan tinggi di Bandar Lampung seperti Universitas Lampung (2010-2015), STKIP PGRI Bandar Lampung (2012-2015), Universitas Muhammadiyah Lampung (2014-2015), dan Poltekes Tanjung Karang (2015-2018). Saat ini penulis

ISBN. 978-602-5825-94-1



9 1786025 182594 1

Penerbit CV. LADUNY ALIFATAMA
Anggota IKAPI

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 49, Kota Metro – Lampung.
Telp. 085269181545 - 0811361113



LADUNY
Maju Karena Ilmu